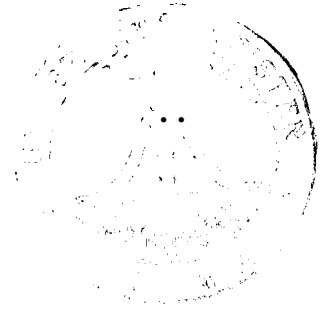


4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN



4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. "X" didirikan pada tahun 1997, PT. "x" merupakan pabrik spunbond pertama di Indonesia yang bukan merupakan tenunan, bertempat tinggal di kota terbesar kedua di Indonesia, yaitu Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Perjalanan yang mudah melalui pelabuhan, jalan tol dan 30 menit dengan mobil dari bandara Juanda, semua ini demi kenyamanan yang memudahkan perusahaan untuk mengirim barang ke pelanggan baik dalam pulau ataupun luar pulau.

PT. "X" mengawali produksi produk tersebut yaitu spunbond secara komersial dengan kapasitas pertama sebanyak 3500 meter per tahun pada Januari 1999 dengan melakukan penjualan ke beberapa perusahaan di Surabaya. Akhirnya dengan komitmen tinggi untuk meneruskan pengembangan dan peningkatan, PT. "X" telah mencanangkan program keduanya pada tahun 2002 dan memulai produksinya pada pertengahan tahun 2002, dengan mencapai level kapasitas produksi menjadi 7200 meter per tahun dengan memperluas wilayah penjualannya ke beberapa wilayah lain antara lain ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam rangka meningkatkan penjualan PT. "X" menerapkan Sistem Manajemen Total (TQM) Kualitas yang meliputi kualitas staff, dengan adanya penerapan sistem tersebut PT. "x" diwajibkan untuk menerapkan prosedur jaminan kualitas dan kontrol yang ketat untuk menjamin produk kami memenuhi kualitas yang baik sebelum dipasarkan.

Sebagai bagian untuk memenuhi komitmen, PT. "X" telah mendapat sertifikat ISO 9001:2000 pada akhir tahun 2002 dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan percaya bahwa karyawan adalah asset yang berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan.

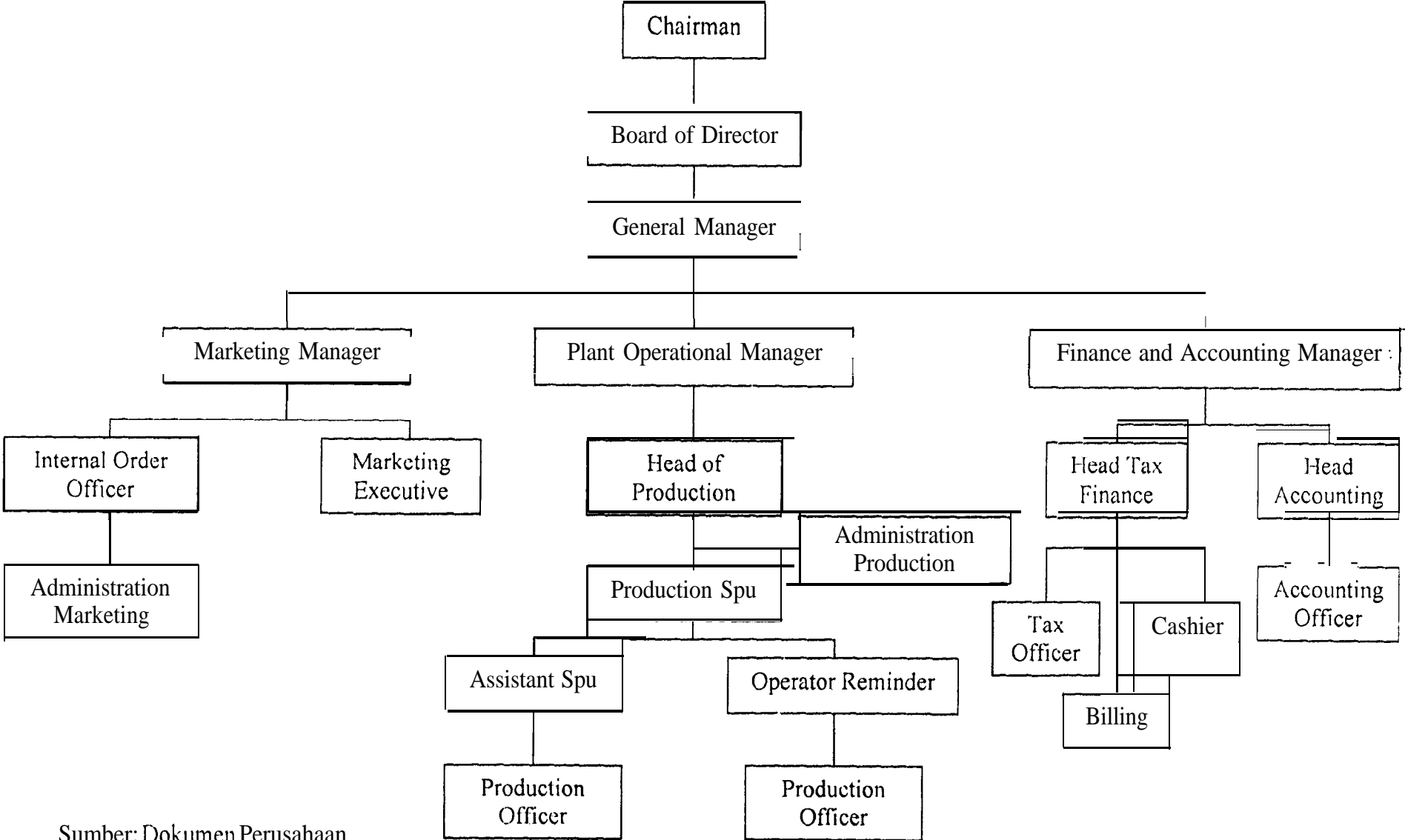
Yang menjadi dasar PT. "X" dalam memilih produk spunbond yang bukan merupakan tenunan adalah karena sekarang masih jarang ada. perusahaan yang menjual produk tersebut selain itu PT, "X" memahami bahwa bahan tersebut dapat

memberikan kontribusi yang besar terhadap manusia dalam membuat kehidupan lebih baik, PT. "X" menjalani misi tersebut untuk memberi kontribusi yang terbaik dan berguna bagi masyarakat.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu perusahaan, kelancaran usaha merupakan syarat utama untuk mencapai efektivitas dan produktivitas yang tinggi. Hal tersebut dapat dicapai apabila perusahaan memiliki struktur organisasi yang dapat menghubungkan antara atasan dan bawahan serta wewenang dan tanggungjawab yang dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Struktur organisasi yang baik harus fleksibel, sehingga memungkinkan untuk diadakan perubahan atau perbaikan dan dapat menunjang kesuksesan perusahaan tersebut. Bentuk struktur organisasi dari PT. "X" adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT. "X"



Sumber: Dokumen Perusahaan

Dari gambar 4.1. dapat kita lihat pada posisi puncak diduduki oleh *Chairman* sebagai posisi tertinggi, *Chairman* dibantu oleh *Board Of Director (BOD)*. Di bawah BOD ini terdapat *General Manager (GM)* yang membawahi 3 manajer yaitu *Marketing Manager*, *Plant Operational Manager*, dan *Financial and Accounting Manajer*.

Adapun uraian mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian atau fungsi yang ada dalam struktur organisasi tersebut, antara lain tentang *Chairman*, *BOD*, *General Manager*, dan bidang-bidang di bawahnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. *Chairman*

1. Menentukan visi dan misi perusahaan.
2. Sebagai pendiri perusahaan yang menyeter modal untuk pendirian perusahaan.
3. Berperan sebagai komisaris perusahaan.
4. Memberikan persetujuan apabila perusahaan akan membeli mesin produksi yang baru.

b. *Board Of Director (BOD)*

1. Melaksanakan keputusan *Chairman*.
2. Berperan sebagai direktur perusahaan yang menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh *general manager (GM)*.

c. *General Manager (GM)*

1. Merupakan *top manager* yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pengelolaan, memberikan otorisasi terhadap suatu kebijakan perusahaan serta pelaksanaan aktivitas dari tiap-tiap departemen yang ada dibawahnya.
2. Memberikan informasi kepada bawahannya mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan serta perubahannya.
3. Mengawasi dan mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan oleh setiap departemen dalam perusahaan.
4. Menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintah dan pihak luar perusahaan.

d. *Marketing Manager*

1. Mengatur segala hal tentang penjualan dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang pemasaran.
2. Meneliti kebijakan tentang pemberian potongan harga dan membina hubungan baik dengan perusahaan lain.
3. Mengadakan studi perbandingan mengenai jenis-jenis jasa atau produk dan kualitas produk pesaing.
4. Mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan faktor-faktor internal (kebijakan promosi dan penentuan harga) dan faktor eksternal (analisis pasar).

e. *Plant Operational Manager*

1. Membuat perencanaan dan mengawasi pelaksanaan proses produksi yang ada di dalam perusahaan.
2. Mengkoordinir pekerja dan mengatur cara kerja yang ada dalam perusahaan
3. Bertanggung jawab atas kualitas barang yang dihasilkan.
4. Melaporkan bila ada kerusakan mesin.

f. *Finance and Accounting Manager*

1. Mencatat pembelian dan hasil penjualan perusahaan.
2. Membuat laporan keuangan perusahaan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal.
3. Mengadakan pembukuan dan mengatur masalah yang berhubungan dengan pengalokasian dana perusahaan.

4.1.3. Keternagakerjajaan

Jumlah pegawai atau karyawan PT. "X" adalah sekitar 156 orang, dengan mengambil kebijaksanaan dengan menggunakan sistem penggajian bulanan. Jam kerja yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Bagian kantor, yaitu:

Jam kerja : pk. 08.00-17.00

Jam istirahat : pk. 12.00-13.00

2. Bagian pekerja produksi dibagi menjadi 3 shift, yaitu:

- a. Jam kerja : pk. 07.00-15.00
Jam istirahat : pk. 12.00-13.00
- b. Jam kerja : pk. 15.00-23.00
Jam istirahat : pk. 18.00-19.00
- c. Jam kerja : pk. 23.00-07.00
Jam istirahat : pk. 05.00-06.00

Sebagai keterangan, untuk bagian kantor jika lebih dari pukul 17.00 dianggap lembur dan uang lembur akan dihitung tiap jam. Untuk bagian produksi, PT. "X" mengambil kebijaksanaan akan berproduksi selama 24 jam secara terus menerus.

4.1.4. Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan, baik itu perusahaan yang baru berdiri maupun yang telah berdiri tentu mempunyai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan merupakan hasil akhir dan titik akhir atau segala sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan cara mengarahkan usaha-usaha atau tujuan di masa sekarang.

Untuk mencapai tujuan perusahaan harus menentukan langkah-langkah yang tepat dan teratur agar terdapat kesatuan tindakan. Oleh karena itu tujuan perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu yang relatif singkat, dan tujuan jangka pendek yang ingin dicapai perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mencapai target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Dapat bertahan dalam persaingan.
3. Memenuhi keinginan serta kebutuhan pelanggan dengan perbedaan strategi serta peningkatan pelayanan.
4. Memaksimalkan laba perusahaan.

Tujuan jangka panjang merupakan kelanjutan dari tujuan jangka pendek perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan adalah:

1. Dapat menyediakan kemungkinan aplikasi yang luas agar dapat memenuhi kebutuhan pasar non woven spunbond di masa yang akan datang.
2. Menyediakan produk yang mempunyai sifat yang khusus yang sebagian tersembunyi dan tidak dapat dilihat langsung tetapi memiliki kontribusi yang tidak dapat diragukan lagi di dunia modern.
3. Mengadakan perluasan usaha yang lebih baik.
4. Berusaha memaksimalkan laba, sehingga perusahaan dapat melakukan perluasan pasar.
5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan yang ada dalam perusahaan.

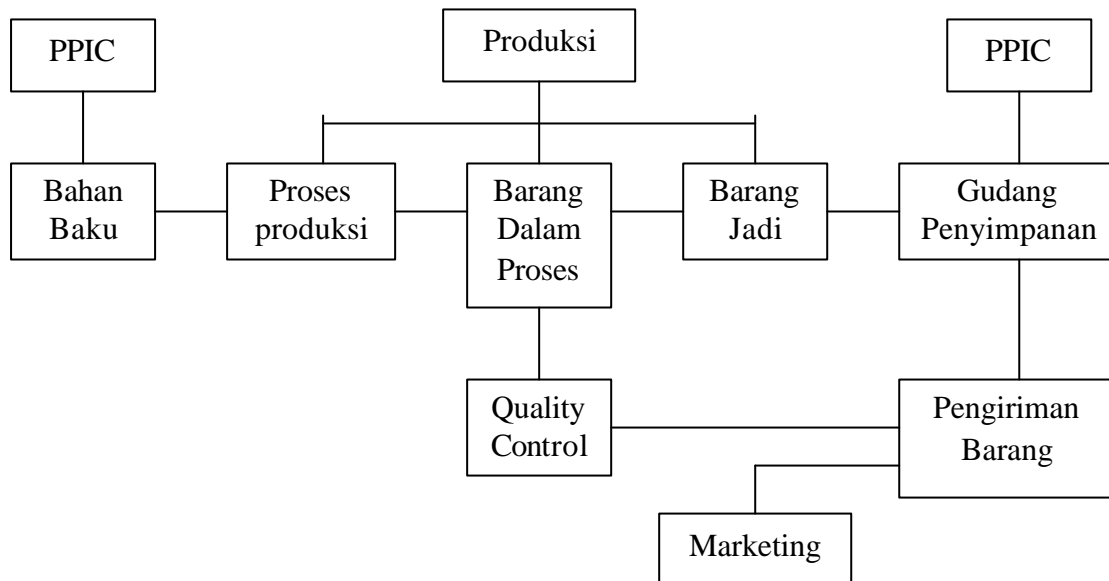
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Gambaran Aktivitas Perusahaan

PT. "X" merupakan perusahaan manufaktur yang selalu tumbuh dengan pesat, dinamis dalam melakukan ekspansi dan senantiasa menjaga kualitas serta efisiensi dalam operasionalnya. Sebagai perusahaan manufaktur, PT. "X" melakukan aktivitas penjualan terhadap perusahaan lainnya yang membutuhkan bahan tersebut. Berikut ini adalah keseluruhan aktivitas produksi yang dilakukan oleh PT. "X":

1. Pembelian bahan baku yaitu berupa biji plastik dibawah pengawasan PPIC (*Production and Planning Inventory Control*) sehingga bahan yang dibeli benar-benar berkualitas tinggi.
2. Proses produksi meliputi bahan baku dimasukkan ke dalam mesin yang berteknologi Jepang menjadi barang dalam proses sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual.
3. Barang Jadi dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan di bawah pengawasan PPIC.
4. Barang jadi siap dikirim ke konsumen berdasarkan pesanan dengan bantuan dari marketing.

Gambar 4.2. Gambaran Aktivitas Produksi PT. "X"



Sumber : Dokumen Perusahaan

4.2.2. Prosedur Pembelian

PT. "X" merupakan perusahaan manufaktur yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT. "X" biasanya melakukan pembelian dari pemasok berdasarkan sistem *order* atau pesanan. Semua pembelian itu dilakukan secara kredit dan dibayar setelah PT. "X" menerima pesanan tersebut beserta dengan surat tagihannya. Dari Lampiran 1 dapat dilihat bahwa:

1. Masa pembayaran yang telah ditetapkan adalah dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
2. Untuk kebijakan penerimaan faktur pajak, PT. "X" menerima faktur pajak tersebut adalah paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penyerahan.
3. Tetapi PT. "X" baru mengkreditkannya pada saat pelunasan.

PT. "X" mengambil kebijakan demikian dengan maksud agar lebih efisien dalam hal waktu maupun tenaga yaitu sekaligus menghitung berapa nominal yang harus dilunasi dan juga sekaligus dapat mengetahui berapa Pajak Masukan (PM) yang akan dikreditkan. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, terdapat beberapa transaksi yang pengkreditan Pajak Masukannya tidak sesuai atau tidak sama dengan masa pajak diterimanya faktur pajak.

Transaksi pembelian yang dilakukan oleh pihak perusahaan berasal dari pemasok dalam negeri yaitu dari Jakarta, Bandung, dan Semarang yang semuanya sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pembelian dilakukan oleh PT. "X" dengan melihat kondisi harga jual yang ditetapkan oleh pemasok, jika harga yang ditetapkan lebih mahal dari biasanya maka PT. "X" akan menurunkan volume pembeliannya begitu pula sebaliknya jika harga yang ditetapkan pemasok turun maka PT. "X" akan meningkatkan volume pembeliannya.

4.2.2.1. Prosedur Retur Pembelian

Selain itu perusahaan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat atau rusak kepada pemasok dalam batas maksimum 1 (satu) bulan setelah pesanan diterima dengan prosedur sebagai berikut:

1. Akan dilunasi oleh pihak pemasok dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari penyerahan pesanan yang dikembalikan,
2. Dalam hal ini PT. "X" akan membuat nota retur pada saat menerima pelunasan dari pihak pemasok. (dapat dilihat pada Lampiran 5)

Maka dari itu peran PPIC (*Production and Planning Inventory Control*) sangat dibutuhkan dalam melihat kualitas dari pesanan yang diterima. Barang dagangan yang sudah diterima dari pihak pemasok akan dimasukkan ke dalam gudang dan dilakukan pemeriksaan secara fisik. Bila dalam pemeriksaan itu terdapat pesanaan yang tidak sesuai dengan permintaan atau cacat, maka perusahaan dapat mengembalikan pesanan tersebut kepada pemasok. Sedangkan untuk pesanan yang diterima sesuai dengan permintaan perusahaan, maka bahan baku tersebut segera akan dimasukkan ke dalam mesin untuk diproses. Berikut ini adalah data pembelian yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan oleh PT. "X" selama tahun 2002 pada tabel 4.1.:

Tabel 4.1. Data Pembelian Selama Tahun 2002
(dalam Rupiah)

Pemasok	Kategori Produk	Total Tahun 2002
PT. Polyfincanggih	Polypropylene (PP)	1.322.233.839,34
PT. Indorama Sintetik	Polyester (PET)	1.358.597.890,91
PT. Indorama Sintetik	Recycled Polyester Bottles	1.184.252.191,82
PT. Bassel	Nylon	2.758.054.180,23
PT. Exxson	Biodegradable Polymers (PLA)	1.545.691.659,36
	TOTAL	8.168.829.761,66

Sumber: dokumen perusahaan

Untuk lebih memperjelas, data pembelian yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dilakukan oleh PT. "X" selama tahun 2002 dapat dilihat pada lampiran 1. Dan berdasarkan penelitian PT. "X" tidak melakukan pembelian dari pemasok yang bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).

4.2.3. Prosedur Penjualan

Barang dagangan yang sesuai dengan permintaan konsumen dan telah didata oleh perusahaan nantinya siap untuk dikirim ke konsumen sesuai dengan pesanan masing-masing. Untuk pesanan dalam pulau yaitu antara lain Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta dikirim melalui lalu lintas darat yaitu dengan diangkut truk, sedangkan untuk pesanan dari luar pulau yaitu antara lain Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dikirim dengan menggunakan lalu lintas udara, khususnya bagi konsumen yang membutuhkan barang tersebut sesegera mungkin, dan lewat lalu lintas laut bagi konsumen yang tidak segera membutuhkan barang. Barang dagangan dijual secara langsung kepada konsumen tanpa adanya pihak perantara. Dalam hal ini proses penjualan terjadi ketika pihak konsumen menghubungi PT. "X" dan kemudian PT. "X" mengirimkan *customer order* untuk mengadakan perjanjian kontrak antara

kedua perusahaan dengan harga yang sudah disetujui kedua belah pihak. Dengan prosedur sebagai berikut:

1. Dalam hal pembayaran PT. "X" menerapkan sistem pembayaran kredit dengan jatuh tempo maksimal kira-kira 3 (tiga) bulan setelah pengiriman barang.
2. PT. "X" membuat faktur pajak pada saat pelunasan atas Barang Kena Pajak (BKP) yang telah dibeli oleh konsumen. (dapat dilihat di Lampiran 2)

PT. "X" mengambil kebijakan demikian dengan alasan yang sama waktu meminta faktur pajak masukan yaitu agar lebih efisien dalam hal waktu maupun tenaga yaitu sekaligus menghitung berapa nominal yang akan diterima dan juga sekaligus dapat mengetahui berapa Pajak keluaran (PK) yang akan dikreditkan. Selain itu untuk mencegah konsumen yang tidak melakukan pelunasan karena jika tidak melakukan pelunasan maka PT. "X" juga tidak akan memberikan faktur pajaknya.

4.2.3.1. Prosedur Retur Penjualan

Dalam hal terjadinya retur penjualan:

1. Pihak perusahaan bersedia menerima pengembalian barang dagangan yang sudah dibeli dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan dari penyerahan barang dagangan sekaligus meminta nota retur dari pihak konsumen.
2. PT. "X" akan melunasi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari penyerahan barang dagangan yang dikembalikan.(dapat dilihat di Lampiran 5)

Dengan demikian apabila terdapat barang dagangan yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen atau barang itu rusak maupun cacat, maka pihak perusahaan siap menerima kembali pengembalian barang tersebut. Data penjualan yang dilakukan oleh PT. "X" selama tahun 2002 adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 4.2.:

Tabel 4.2. Data Penjualan Selama Tahun 2002
(dalam Rupiah)

Pembeli	Total Tahun 2002
PT. Aristocrat	1.336.297.956
PT. Nylex	1.392.631.144
PT. Medipro	1.095.501.742
PT. Creative Contract	1.684.678.124
PT. LNB	1.403.865.498
PT. Marbenny	1.300.799.100
PT. Sealed	1.114.412.720
PT. Wastaflex	1.071.554.940
PT. Dominion	1.245.811.189
PT. Maywa	603.061.900
PT. Softex	610.079.140
TOTAL	12.858.693.453

Sumber: dokumen perusahaan

Untuk memperjelas, data penjualan yang dilakukan oleh PT. “X” setiap bulan selama tahun 2002 dapat dilihat di Lampiran 2. Dan berdasarkan penelitian PT. “X” tidak melakukan penjualan kepada pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP).

4.2.4. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Menurut PT . “X”

Dikarenakan perlakuan akuntansi PPN berpengaruh dalam menentukan besarnya pajak terutang setiap bulannya, maka berdasarkan lampiran 1 dan Lampiran 2 maka dapat dibuat jurnal sebelum koreksi yang diringkaskan setiap bulannya sebagai berikut:

1. Bulan Januari

Transaksi pembelian BKP bulan Januari secara kredit

Pembelian Rp. 564.652.727,28

Hutang Rp. 564.652.727,28

Transaksi pelunasan atas pembelian BKP bulan Januari

Hutang Rp. 28.309.090,90

PPN Masukan Rp. 2.830.909,09

Kas Rp. 31.139.999,99

Transaksi penjualan BKP bulan Januari secara kredit

Piutang Rp. 894.625.000,00

Penjualan Rp. . 894.625.000,00

Transaksi pelunasan atas penjualan BKP bulan Januari

Kas Rp. 328.047.500,00

Piutang Rp. 298.225.000,00

PPN Keluaran Rp. 29.822.500,00

Transaksi retur penjualan BKP bulan Januari secara kredit

Retur Penjualan Rp. 139.500.000,00

Piutang Rp. 139.500.000,00

Transaksi pelunasan atas retur penjualan BKP untuk transaksi bulan Januari

Piutang Rp. 139.500.000,00

PPN Keluaran Rp. 13.950.000,00

Kas Rp. 153.450.000,00

Pengakuan PPN terutang setelah retur bulan Januari

PPN Keluaran Rp. 15,872,500.00

PPN Masukan Rp. 2,830,909.10

PPN Kurang Bayar Rp. 13.041.590,90

Untuk bulan-bulan selanjutnya dapat dilihat di lampiran 7.

Perlakuan Akuntansi PPN di atas berpengaruh dalam menentukan PPN terutang setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.3. dan Tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.3. Jumlah Pajak Terutang Selama Tahun 2002
(Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak terutang
Januari	2.830.909,10	29.822.500	26.991.590,90
Februari	21.044.000	58.272.250	37.228.250
Maret	71.852.563,62	104.773.350	32.920.786,40
April	56.293.070,91	103.954.550	47.661.479,10
Mei	54.813.182,18	123.491.290	68.678.107,90
Juni	81.881.347,27	140.404.487	58.523.139,80
Juli	63.011.572,73	64.742.660	1.731.087,27
Agustus	91.940.706,76	111.898.147,70	19.957.440,94
September	78.013.655,46	79.549.992	1.536.336,54
Oktober	57.628.985,18	82.085.210	24.456.224,82
November	103.321.461,31	156.000.282	52.678.820,69
Desember	83.184.281,81	132.345.747	49.161.465,19
Januari	13.114.000	59.945.295,80	46.831.295,80
Februari	37.953.240	38.583.567,60	630.327,60
TOTAL	816.882.976,33	1.285.869.329,10	468.986.352,77

Sumber: dokumen perusahaan

Selain terjadi penjualan dan pembelian juga terdapat retur penjualan dan retur pembelian yang akan mengurangi jumlah pajak terutang yang akan dibayar. Berikut ini adalah perhitungan jumlah pajak terutang setelah retur menurut PT. "X" Berdasarkan Lampiran 5 maka perhitungan pengurangan Pajak Masukan atas retur pembelian menurut PT. "X":

1. Bulan Maret
 $\text{Rp. } 71.852.563,62 - \text{Rp. } 2.530.025 = \text{Rp. } 69.322.538,62$
2. Bulan April
 $\text{Rp. } 56.293.070,91 - \text{Rp. } 2.850.000 = \text{Rp. } 53.443.070,91$
3. Bulan Juli
 $\text{Rp. } 63.011.572,73 - \text{Rp. } 5.590.500 = \text{Rp. } 57.421.072,73$
4. Bulan September
 $\text{Rp. } 78.013.655,46 - \text{Rp. } 8.107.850 = \text{Rp. } 69.905.805,46$
5. Bulan Oktober
 $\text{Rp. } 57.628.985,18 - \text{Rp. } 1.797.000 = \text{Rp. } 55.831.985,18$

Perhitungan pengurangan Pajak Keluaran atas retur penjualan menurut PT. "X"

1. Bulan Januari
 $\text{Rp. } 29.822.500 - \text{Rp. } 13.950.000 = \text{Rp. } 15.872.500$
2. Bulan April
 $\text{Rp. } 103.954.550 - \text{Rp. } 2.559.000 = \text{Rp. } 101.395.550$
3. Bulan Mei
 $\text{Rp. } 123.491.290 - \text{Rp. } 14.400.000 = \text{Rp. } 109.091.290$
4. Bulan Juni
 $\text{Rp. } 140.404.487 - \text{Rp. } 17.615.000 = \text{Rp. } 122.789.487$
5. Bulan Desember
 $\text{Rp. } 132.345.747 - \text{Rp. } 23.770.000 = \text{Rp. } 108.575.747$

Dengan adanya retur penjualan dan retur pembelian maka jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4. Jumlah Pajak Terutang Setelah Retur Selama Tahun 2002
(Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak terutang
Januari	2.830.909,10	15.872.500	13.041.590,90
Februari	21.044.000	58.272.250	37.228.250
Maret	69.322.538,62	104.773.350	35.450.811,38
April	53.443.070,91	101.395.550	47.952.479,09
Mei	54.813.182,18	109.091.290	54.278.107,82
Juni	81.881.347,27	122.789.487	40.908.139,73
Juli	57.421.072,73	64.742.660	7.321.587,27
Agustus	91.940.706,76	111.898.147,70	19.957.440,94
September	69.905.805,46	79.549.992	9.644.186,54
Oktober	55.831.985,18	82.085.210	26.253.224,82
November	103.321.461,31	156.000.282	52.678.820,69
Desember	83.184.281,81	108.575.747	25.391.465,19
Januari	13.114.000	59.945.295,80	46.831.295,80
Februari	37.953.240	38.583.567,60	630.327,60
TOTAL	796.007.601,33	1.213.575.329,10	417.567.727,77

Sumber: dokumen perusahaan

Dalam hal ini total pajak terutang yang dibayar oleh perusahaan ke kas negara selama tahun 2002 adalah sebesar Rp. 417.567.727,77. Dikarenakan bulan Januari dan Bulan Februari hanya merupakan efek dari transaksi yang terjadi di bulan Desember, maka pembatasan masa dilakukan sampai dengan bulan Desember. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5. Jumlah Pajak Terutang Setelah Retur Selama Tahun 2002
(Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak terutang
Januari	2.830.909,10	15.872.500	13.041.590,90
Februari	21.044.000	58.272.250	37.228.250
Maret	69.322.538,62	104.773.350	35.450.811,38
April	53.443.070,91	101.395.550	47.952.479,09
Mei	54.813.182,18	109.091.290	54.278.107,82
Juni	81.881.347,27	122.789.487	40.908.139,73
Juli	57.421.072,73	64.742.660	7.321.587,27
Agustus	91.940.706,76	111.898.147,70	19.957.440,94
September	69.905.805,46	79.549.992	9.644.186,54
Oktober	55.831.985,18	82.085.210	26.253.224,82
November	103.321.461,31	156.000.282	52.678.820,69
Desember	83.184.281,81	108.575.747	25.391.465,19
TOTAL	744.940.361,33	1.115.046.465,70	370.106.104,37

Sumber: dokumen perusahaan

4.2.5. Laporan Keuangan

PT. "X" menyusun laporan keuangan khususnya neraca setiap akhir tahun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan tujuan agar mudah dipahami dan dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengukur kinerja perusahaan, selain itu juga untuk mengetahui kondisi perusahaan yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Penyusunan neraca dimaksudkan untuk mengetahui posisi aktiva, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu, sedangkan penyusunan laporan laba rugi untuk mengetahui laba yang didapat perusahaan dalam satu periode tertentu. Dari transaksi tersebut Pajak merupakan transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan itu sendiri akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan khususnya untuk pihak internal perusahaan. Berikut ini adalah laporan laba rugi PT. "X" yang dapat dilihat pada tabel 4.6:

Tabel 4.6.
PT. "X"
Laporan Rugi/Laba
Per 31 Desember 2002
(Dalam Rupiah)

Penjualan		12.858.693.453,00
Retur Penjualan		(722.940.000,00)
Penjualan Bersih		<u>12.135.753.453,00</u>
Harga Pokok Penjualan		<u>(7.960.076.011,00)</u>
LABA KOTOR		4.175.677.422,00
BIAYA USAHA		
Biaya Gaji Penjual	600.250.000,00	
Biaya Promosi	425.500.000,00	
Biaya Iklan	<u>362.250.560,00</u>	
		1.388.000.560,00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI		
Biaya Gaji Kantor	425.650.000,00	
Biaya listrik	290.365.000,00	
Biaya Telephon/Fax	156.550.500,00	
Biaya Perlengkapan Kantor	195.755.000,00	
Biaya Perawatan dan Pemeliharaan	185.650.520,00	
Biaya Penyusutan	195.852.300,00	
Biaya Pengemasan	186.563.050,00	
Biaya Bunga	172.633.165,00	
Biaya Lain-Lain	<u>85.230.630,00</u>	
		<u>1.894.250.165,00</u>
Laba Bersih		<u>893.426.697,00</u>

Sumber: Dokumen Perusahaan

Berdasarkan tabel 4.5. maka jumlah hutang PPN pada neraca per 31 Desember 2002 menurut PT. "X" adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 4.7.:

Tabel 4.7.
PT. "X"
Neraca
Per 31 Desember 2002
(Dalam Rupiah)

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas	950.765.250,00
Bank	291.513.750,00
Piutang	698.207.534,00
Persediaan Barang	210.229.000,00
	<hr/>
Jumlah Aktiva Lancar	2.150.715.534,00
AKTIVA TETAP	
Bangunan	723.750.000,00
Kendaraan	496.380.000,00
Peralatan	166.450.750,00
Mesin	635.552.750,00
Akumulasi penyusutan	(275.553.351,00)
	<hr/>
Jumlah Aktiva Tetap	<u>1.746.580.149,00</u>
TOTAL AKTIVA	3.897.295.683,00
HUTANG DAN MODAL	
HUTANG	
Hutang Dagang	379.532.400,00
Hutang Bank	440.366.341,00
Hutang PPN	25.391.465,00
	<hr/>
Jumlah Hutang	845.290.206,00
MODAL	
Modal	738.100.313,00
Laba Ditahan	1.420.478.467,00
Laba Bersih	893.426.697,00
	<hr/>
Jumlah Modal	<u>3.052.005.477,00</u>
TOTAL HUTANG DAN MODAL	<u>3.897.295.683,00</u>

Sumber: Dokumen Perusahaan

4.3. Analisis dan Pembahasan

Dari data dan informasi hasil pengamatan pada PT. "X" di atas pasti akan terjadi koreksi dalam menentukan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang masih harus dibayar oleh PT. "X" setiap bulannya, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kebijakan menurut perlakuan perusahaan dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN.

1. Supaya PT. "X" tidak mengalami kerugian (Pajak Masukannya menjadi tidak dapat dikreditkan) akibat keterlambatan dalam hal mengkreditkan Pajak Masukannya maka sebaiknya PT. "X" mengkreditkannya pada masa pajak yang sama dengan diterimanya faktur pajak masukan tersebut.
2. Dalam hal terjadinya retur pembelian seharusnya PT. "X" membuat nota retur pada masa pajak yang sama dengan pengembalian barang bukan pada saat pelunasan.
3. PT. "X" membuat faktur pajak pada saat pelunasan sehingga melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) dan (keputusan Menteri Keuangan No.1117/KMK.04/1989), yaitu: Faktur Pajak harus dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran. Atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP.
4. Dalam hal terjadinya retur penjualan seharusnya PT. "X" mengkreditkannya pada masa pajak yang sama dengan diterimanya nota retur tersebut bukan pada saat pelunasan.

Karena kesalahan-kesalahan tersebut diatas akan menyebabkan perbedaan dalam hal jumlah pajak yang terutang yang akan dibayar setiap bulannya. Juga dalam hal perjurnalan PT. "X" juga terdapat kesalahan baik dalam transaksi jual beli maupun transaksi retur penjualan dan retur pembelian, yaitu sebaiknya perjurnalan pada PPN Masukan (dalam transaksi pembelian dan retur pembelian) dan PPN

Keluaran (dalam transaksi penjualan dan retur penjualan) sudah dijurnal pada waktu penyerahan bukan pada waktu pelunasan

Oleh karena itu pada sub bab ini akan dilakukan analisa dan pembahasan tentang bagaimana perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang benar terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada PT. "X".

4.3.1. PT. "X" Sebagai Pengusaha Kena Pajak

PT. "X" merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi *spunbond nonwovens* yang membeli bahan baku dalam jumlah yang besar dari pemasok dan setelah melalui proses produksi PT. "X" akan menjualnya langsung kepada konsumen secara langsung tanpa pihak perantara. Dengan melihat usaha yang dilakukan, sudah jelas bahwa PT. "X" merupakan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini karena barang-barang yang diperdagangkan PT. "X" semuanya merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Di samping itu, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean dan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha.

Selain itu dari data yang diperoleh di atas, khususnya dari omset penjualan dapat diketahui bahwa jumlahnya sangat besar atau sudah melebihi batasan pengusaha kecil, yaitu melebihi Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun buku. Atas dasar tersebut di atas maka PT. "X" wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga PT. "X" mempunyai hak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas barang-barang yang dijualnya tersebut serta PT. "X" akan dipungut juga atas pembelian bahan baku dari pemasok.

4.3.2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perlakuan akuntansi untuk PPN yang dilakukan PT. "X" tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka dari itu perlu dilakukan jurnal koreksi yang dapat dilihat pada lampiran 8. Berikut ini adalah jurnal setelah koreksi :

1. Bulan Januari

Transaksi pembelian BKP secara kredit bulan Januari

Pembelian Rp. 564.652.727,28

PPN Masukan Rp. 56.465.272,72

Hutang Rp. 621.118.000,00

Transaksi pelunasan atas pembelian BKP untuk transaksi bulan Januari (Include PPN)

Hutang Rp. 31.140.000,00

Kas Rp. 31.140.000,00

Transaksi penjualan BKP secara kredit bulan Januari

Piutang Rp. 984.087.500,00

Penjualan Rp. 894.625.000,00

PPN Keluaran RP. 89.462.500,00

Transaksi pelunasan atas penjualan BKP untuk transaksi bulan Januari (Include PPN)

Kas Rp. 328.047.500,00

Piutang Rp. 328.047.500,00

Transaksi retur penjualan BKP secara kredit bulan Januari

Retur Penjualan Rp. 139.500.000,00

PPN Keluaran Rp. 13.950.000,00

Piutang Rp. 153.450.000,00

Transaksi atas retur penjualan yang telah dilunasi untuk transaksi bulan Januari (Include PPN)

Piutang Rp. 153.450.000,00

Kas Rp. 153.450.000,00

Pengakuan PPN terutang setelah retur bulan Januari

PPN Keluaran Rp. 15.872.500,00

PPN Masukan Rp. 2.830.909,10

PPN Kurang Bayar Rp. 13.041.590,90

Untuk bulan-bulan selanjutnya dapat dilihat dilampiran 9.

Perlakuan Akuntansi PPN di atas berpengaruh dalam menentukan PPN terutang setiap bulannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.8. dan Tabel 4.10.

Tabel 4.8. Jumlah Pajak Terutang Selama Tahun 2002
(Dalam rupiah)

Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak Terutang
Januari	2.830.909,10	29.822.500	26.991.590,90
Februari	56.748.363,62	92.897.250	36.148.886,38
Maret	58.680.700	98.678.100	39.997.400
April	53.042.389,08	107.744.920	54.702.531
Mei	73.931.691,27	149.515.510	75.583.818,73
Juni	82.999.892,73	112.878.847	29.878.954,27
Juli	68.439.965,45	74.039.958	5.599.992,55
Agustus	71.110.682,15	86.013.201,70	14.902.519,55
September	69.961.914,62	90.758.940	20.797.025,38
Oktober	88.926.755,57	99.787.138	10.860.382,43
November	83.077.727,27	161.350.938	78.273.210,73
Desember	69.178.745,45	116.561.274	47.382.528,55
Januari	37.953.240	65.820.753,40	27.867.513,40
TOTAL	816.882.975,52	1.285.869.329,10	468.986.354,58

Sumber: dokumen perusahaan

Setelah terjadi retur maka akan menyebabkan perubahan pada jumlah pajak terutang di bulan-bulan terjadinya retur pembelian dan retur penjualan, berikut ini adalah perhitungannya

Berdasarkan Lampiran 6 maka perhitungan pengurangan Pajak Masukan atas retur pembelian menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

1. Bulan Februari

$$\text{Rp. } 56.748.363,62 - \text{Rp. } 2.850.000 = \text{Rp. } 53.898.363,62$$

2. Bulan Maret

$$\text{Rp. } 58.680.700 - \text{Rp. } 2.530.025 = \text{Rp. } 56.150.675$$

3. Bulan Juli

$$\text{Rp. } 68.439.965,45 - \text{Rp. } 9.045.550 = \text{Rp. } 59.394.415,45$$

4. Bulan Agustus

$$\text{Rp. } 71.110.682,15 - \text{Rp. } 6.449.800 = \text{Rp. } 64.660.882,15$$

Perhitungan pengurangan Pajak Keluaran atas retur penjualan menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000

1. Bulan Januari

$$\text{Rp. } 29.822.500 - \text{Rp. } 13.950.000 = \text{Rp. } 15.872.500$$

2. Bulan Maret

$$\text{Rp. } 98.678.100 - \text{Rp. } 11.109.000 = \text{Rp. } 87.569.100$$

3. Bulan April

$$\text{Rp. } 107.744.920 - \text{Rp. } 19.055.000 = \text{Rp. } 88.689.920$$

4. Bulan Mei

$$\text{Rp. } 149.515.510 - \text{Rp. } 4.410.000 = \text{Rp. } 145.105.510$$

5. Bulan November

$$\text{Rp. } 161.350.938 - \text{Rp. } 23.770.000 = \text{Rp. } 137.580.938$$

Dengan adanya retur penjualan dan retur pembelian maka jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9. berikut ini:

Tabel 4.9. Jumlah Pajak Terutang Setelah Retur Selama Tahun 2002
(Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak Terutang
Januari	2.830.909,10	15.872.500	13.041.590,90
Februari	53.898.363,62	92.897.250	38.998.886,38
Maret	56.150.675	87.569.100	31.418.425
April	53.042.389,08	88.689.920	35.647.530,92
Mei	73.931.691,27	145.105.510	71.173.818,73
Juni	82.999.892,73	112.878.847	29.878.954,27
Juli	59.394.415,45	74.039.958	14.645.542,55
Agustus	64.660.882,15	86.013.201,70	21.352.319,55
September	69.961.914,62	90.758.940	20.797.025,38
Oktober	88.926.755,57	99.787.138	10.860.382,43
November	83.077.727,27	137.580.938	54.503.210,73
Desember	69.178.745,45	116.561.274	47.382.528,55
Januari	37.953.240	65.820.753,40	27.867.513,40
TOTAL	796.007.601,31	1.213.575.330,10	417.567.728,79

Sumber: dokumen perusahaan

Dalam hal ini pajak yang masih harus dibayar oleh perusahaan ke kas negara adalah sebesar Rp. 417.567.728,79. Dikarenakan bulan Januari hanya merupakan efek dari transaksi yang terjadi di bulan Desember, maka pembatasan masa dilakukan sampai dengan bulan Desember. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.10. berikut ini:

Tabel 4.10. Jumlah Pajak Terutang Setelah Retur Selama Tahun 2002
(Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	Pajak Terutang
Januari	2.830.909,10	15.872.500	13.041.590,90
Februari	53.898.363,62	92.897.250	38.998.886,38
Maret	56.150.675	87.569.100	31.418.425
April	53.042.389,08	88.689.920	35.647.530,92
Mei	73.931.691,27	145.105.510	71.173.818,73
Juni	82.999.892,73	112.878.847	29.878.954,27
Juli	59.394.415,45	74.039.958	14.645.542,55
Agustus	64.660.882,15	86.013.201,70	21.352.319,55
September	69.961.914,62	90.758.940	20.797.025,38
Oktober	88.926.755,57	99.787.138	10.860.382,43
November	83.077.727,27	137.580.938	54.503.210,73
Desember	69.178.745,45	116.561.274	47.382.528,55
TOTAL	758.054.361,31	1.147.754.576,70	389.700.215,39

Sumber: dokumen perusahaan

4.3.3. Analisa Perbandingan Antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang Disetor ke Kas Negara

Berdasarkan Tabel 4.5. dan Tabel 4.10. maka dapat dilihat bahwa jumlah pajak terutang tiap bulannya berbeda ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan antara PT. "X" sendiri dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini.

Tabel 4.11 Selisih Jumlah Pajak Terutang Menurut PT. "X"
Dan
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
(Dalam Rupiah)

Bulan	Pajak Terutang Menurut PT. "X"	Pajak Terutang Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000	Jumlah Selisih
Januari	13.041.590,90	13.041.590,90	0
Februari	37.228.250	38.998.886,38	1.770.636,38
Maret	35.450.811,38	31.418.425	(4.032.386,38)
April	47.962.479,09	35.647.530,92	(12.314.948,17)
Mei	54.278.107,82	71.173.818,73	16.895.710,91
Juni	40.908.139,73	29.878.954,27	(11.029.185,46)
Juli	7.321.587,27	14.645.542,55	7.323.955,28
Agustus	19.957.440,94	21.352.319,55	1.394.878,61
September	9.644.186,54	20.797.025,38	11.152.838,84
Oktober	26.253.224,82	10.860.382,43	(15.392.842,39)
November	52.678.820,69	54.503.210,73	1.824.390,04
Desember	25.391.465,19	47.382.528,55	21.991.063,36
TOTAL	370.106.104,37	389.700.215,39	19.594.111,02

Sumber: dokumen perusahaan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pajak terutang menjadi lebih besar dengan total selisih sebesar Rp. 19.594.111,02. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada perhitungan berikut ini:

Pajak terutang menurut Undang-Undang:	Rp. 389.700.215,39
Pajak terutang menurut PT. "X":	(Rp. 370.106.104,37)
Total selisih	<u>Rp. 19.594.111,02</u>

Tabel 4.11.
PT. "X"
Neraca Setelah Koreksi
Per 31 Desember 2002
(Dalam Rupiah)

AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
Kas	972.756.313,00
Bank	291.513.750,00
Piutang	698.207.534,00
Persediaan Barang	210.229.000,00
	<hr/>
Jumlah Aktiva Lancar	2.172.706.597,00
AKTIVA TETAP	
Bangunan	723.750.000,00
Kendaraan	496.380.000,00
Peralatan	166.450.750,00
Mesin	635.552.750,00
Akumulasi penyusutan	(275.553.351,00)
	<hr/>
Jumlah Aktiva Tetap	1.746.580.149,00
TOTAL AKTIVA	3.919.286.746,00
HUTANG DAN MODAL	
HUTANG	
Hutang Dagang	379.532.400,00
Hutang Bank	440.366.341,00
Hutang PPN	47.382.528,00
	<hr/>
Jumlah Hutang	867.281.269,00
MODAL	
Modal	738.100.313,00
Laba Ditahan	1.420.478.467,00
Laba Bersih	893.426.697,00
	<hr/>
Jumlah Modal	3.052.005.477,00
TOTAL HUTANG DAN MODAL	3.919.286.746,00